

---

# PEREMPUAN-PEREMPUAN PIONIR DALAM PENDIDIKAN DOKTER DI INDONESIA MASA KOLONIAL

Baha Uddin, Bambang Purwanto, Mutiah Amini

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

*Email: bahauddin@ugm.ac.id*  
*Email: bambang.fib@ugm.ac.id*  
*Email: mutiah.a@ugm.ac.id*

## Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya penelitian yang mengkaji mengenai keberadaan perempuan dalam pendidikan dokter di Indonesia pada masa kolonial. Hal ini sangat penting karena pendidikan dokter menempati status pendidikan lanjutan dan tergolong lembaga yang elite dan prestisius. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah mengenai akses perempuan Indonesia untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan dokter. Kajian ini bertujuan memberi kontribusi kajian sejarah perempuan dalam bidang pendidikan dokter dalam historiografi Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan beberapa tahapan penelitian, yaitu, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Selama hampir 60 tahun pendidikan dokter di STOVIA, semua siswanya berasal dari kalangan laki-laki. Pemerintah kolonial menganggap perempuan pribumi tidak layak untuk berprofesi sebagai dokter. Setelah terjadi perdebatan panjang, pada 1912, akhirnya pemerintah kolonial mengizinkan perempuan pribumi untuk mendapatkan pendidikan dokter. Pionir perempuan pribumi untuk mengakses pendidikan dokter adalah Marie Thomas kemudian disusul oleh Anna Warouw, keduanya berasal dari Minahasa. Keduanya mendobrak diskriminasi pemerintah kolonial dalam hal akses perempuan pribumi mendapatkan hak dalam pendidikan dokter.

**Kata Kunci:** diskriminasi; kolonial; pendidikan dokter; perempuan pribumi

## *PIONEERING WOMEN IN MEDICAL EDUCATION IN COLONIAL INDONESIA*

### *Abstract*

*This article is motivated by the limited research on the presence of women in medical education in Indonesia during the colonial period. This is very important because medical education occupies the status of advanced education and is classified as an elite and prestigious institution. Therefore, the issue raised in this study is about Indonesian women's access to opportunities to pursue medical education. This study aims to contribute to the historical study of women in medical education in Indonesian historiography. The method used is the historical method with several stages of research, namely, heuristics, verification, interpretation, and historiography. For almost 60 years of medical education at STOVIA, all students were male. The colonial government considered indigenous women unfit to practice as doctors. After a long debate, in 1912, the colonial government finally allowed indigenous women to pursue medical education. The pioneers of indigenous women accessing medical education were Marie Thomas, followed by Anna Warouw, both from Minahasa. They broke through the colonial government's discrimination in terms of indigenous women's access to rights in medical education.*

**Keywords:** *colonial; discrimination; indigenous women; medical education*

## I. PENDAHULUAN

Jika diamati secara mendalam, sejak pendidikan kedokteran dikenalkan pemerintah kolonial Belanda untuk masyarakat bumiputra, yang ditandai dengan pendirian Sekolah Dokter Jawa pada 1851 hingga awal abad ke-20, siswa yang diterima semuanya berjenis kelamin laki-laki. Jika dibandingkan dengan sekolah kejuruan serupa di Hindia Belanda, misalnya pendidikan keguruan, Kweekschool, dalam konteks kesetaraan laki-laki dan perempuan, pendidikan kedokteran dapat dikatakan agak tertinggal. Di Kweekschool pada 1907 tercatat telah menerima perempuan sebagai siswanya. Sjarifah, anak seorang guru bernama Nawawi Soetan Makmoer yang mengajar di Kweekschool Bukittinggi. Sjarifah tercatat sebagai perempuan pertama dari tanah Minang yang menjadi siswa di sekolah guru itu (Nawawi dan Kramer, 1908). Sampai pada awal abad ke-20, tingkat sekolah lanjutan yang bersifat kejuruan, yang dapat ditempuh oleh perempuan bumiputra adalah Kweekschool. Sementara sekolah-sekolah lanjutan kejuruan yang secara khusus diperuntukkan perempuan baru dibuka pada menjelang tahun 1920 dan 1930-an, seperti pendidikan bidan atau perawat dan sekolah rumah tangga (*huishoodschool*) (van der Wal, 1968).

Bersamaan dengan Sjarifah masuk menjadi siswa perempuan di Kweekschool Bukittinggi, isu mengenai kesempatan perempuan untuk dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah milik pemerintah kolonial sedang mengemuka. Ide yang berkembang pada waktu itu masih mengadopsi pemikiran Kartini, bahwa tidak akan ada usaha untuk meninggikan tingkat intelektualitas dan sosial penduduk bumiputra, selama perempuan bumiputra tidak diikutsertakan dalam proses pendidikan. Pendidikan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang dibutuhkan bagi seluruh masyarakat bumiputra (laki-laki dan perempuan) untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kesadaran inilah yang mendorong perempuan bumiputra untuk masuk ke dalam sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial bagi penduduk bumiputra. Namun, pemerintah kolonial Belanda belum membuka semua akses untuk perempuan bumiputra mengenyam pendidikan pada tingkat itu, salah satu contohnya adalah pada pendidikan kedokteran.

Menurut Elsbeth Locher-Scholten, akses pendidikan untuk perempuan bumiputra mengikuti politik rasial pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu tidak mengherankan jika akses bagi kaum perempuan bumiputra pada awal abad ke-20 ini belum diberikan karena dianggap belum saatnya diterapkan di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda baru memperluas pendidikan untuk perempuan bumiputra sekitar tahun 1920 dan 1930an. Meskipun pada dekade itu terjadi peningkatan melek huruf bagi perempuan bumiputra namun jumlahnya sangat minimal, hanya 1,5% dari kalangan perempuan bumiputra di Jawa yang melek huruf pada tahun 1930 (Scholten, 2000).

Dalam konteks ini, menurut Ann Stoler, kekuasaan kolonial dibangun berdasarkan dua premis yang kuat, namun salah. Premis pertama adalah gagasan bahwa orang-orang Eropa di koloni merupakan entitas biologis dan sosial yang mudah diidentifikasi dan terpisah; komunitas “alami” yang memiliki kepentingan kelas yang sama, atribut rasial, kedekatan politik, dan budaya

superior. Premis kedua adalah gagasan terkait bahwa batas-batas yang memisahkan penjajah dari yang terjajah dengan demikian sudah jelas dan mudah digambarkan (Stoler, 1989 a). Lebih lanjut Stoler menyatakan bahwa politik pembatasan rasial pemerintah kolonial ini sangat bergantung pada pembentukan kategori-kategori, klasifikasi hukum dan sosial yang menunjuk siapa yang “putih”, siapa yang “pribumi” (Stoler, 1989 b).

Jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara koloni Inggris di India, apa yang terjadi di Hindia Belanda ini sangat jauh tertinggal. Guha memberikan gambaran dengan jelas bahwa isu akses perempuan bumiputra dalam pendidikan kedokteran ini sudah berkembang di India sejak paruh kedua abad ke-19. Gagasan pendidikan kedokteran perempuan diperdebatkan di India untuk pertama pada 1872 oleh Edward Green Balfour, seorang dokter ahli bedah di Madras. Meskipun pihak berwenang, Madras Medical College, awalnya menentang gagasan tersebut, direktur lembaga pendidikan itu akhirnya memberikan persetujuannya terhadap usulan itu. Hasilnya, empat mahasiswi Eropa atau Anglo-India diterima di Madras Medical College pada 1875. Di Bombay, seorang pengusaha Amerika, George T. Kittredge, menginisiasi pembentukan Medical Women for India Fund pada 1880. Dana tersebut digunakan untuk meletakkan fondasi akses perempuan pada pendidikan kedokteran, dan penggunaan fasilitas medis oleh perempuan dan anak-anak di Bombay. Dalam lingkungan ini, Grant Medical College of Bombay membuka pintunya bagi kandidat perempuan pada tahun 1883 (Guha, 2016).

Di Bengal, pendidikan kedokteran bagi perempuan pada awalnya ditentang karena anggapan kalangan kelas menengah tentang kehormatan yang menyebabkan kemandirian ekonomi perempuan dipandang sebagai potensi ancaman terhadap kehormatan keluarga. Dewan Medis Kalkuta (Calcutta Medical Council) juga menolak usulan tersebut, dengan alasan kekurangan dana dan kekhawatiran akan kesulitan dalam memperkenalkan inovasi serius ke dalam bidang praktik medis yang konservatif. Mediasi dari kalangan Brahmana yang progresif dan beberapa administrator Inggris pada akhirnya menyebabkan perempuan diterima di Medical College mulai bulan Juni 1883 (Balfour and Young, 1929).

Tonggak penting dalam sejarah pelembagaan pendidikan kedokteran perempuan di India adalah berdirinya Dufferin Fund atau National Association for Supplying Female Medical Aid to the Women of India pada 1885. Dana tersebut dirancang sebagai upaya semi resmi untuk mempromosikan pembentukan dan perluasan jaringan rumah sakit, apotek, dan klinik wanita yang rumit di tingkat kota dan distrik dengan cabang di seluruh wilayah India. Pentingnya dana itu terletak pada dorongan yang diberikannya terhadap studi kebidanan. Dalam kasus Bengal, misalnya, dalam waktu 2 tahun setelah pembentukan dana tersebut, Pemerintah Bengal meratifikasi perekrutan pelajar perempuan di Campbell Medical College untuk mendapatkan pendidikan medis dengan jalur serupa yang dirancang untuk *Civil Hospital Asistant*. Para ‘asisten rumah sakit’ perempuan, yang hanya memiliki sedikit pendidikan formal dan diberi gelar *Vernakular Licentiate in Medicine and Surgery* (VLMS) ini, dianggap lebih rendah dibandingkan lulusan Calcutta Medical College.

Pada tahun 1895, 24 mahasiswi telah menerima gelar tersebut terdaftar di kelas Calcutta Medical College dan 34 dari mereka mengikuti kelas asisten rumah sakit di Campbell Medical School (Forbes, 2005).

Isu mengenai keterlibatan perempuan dalam pendidikan pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda dalam bidang kedokteran ini, kemudian menarik perhatian para perempuan Eropa. Perempuan Eropa di Hindia Belanda yang mempunyai perhatian terhadap masalah ini dalam perspektif yang disebut oleh Maxine Molyneux, sebagai “kepentingan gender” yang bersifat strategis. Menurut Molyneux, kepentingan gender yang bersifat strategis diturunkan secara deduktif, berupaya mengubah aturan hidup perempuan, dan hanya dapat dicapai setelah kepentingan praktis diperhitungkan (Molyneux, 1985). Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ketika pemerintah kolonial membuka akses pendidikan kepada perempuan bumiputra pada tahun 1920 dan 1930, lebih banyak memenuhi kepentingan yang bersifat praktis yaitu meningkatkan kemampuan dan peran mereka sebagai istri dan ibu.

Menurut pendapat Scholten, kedudukan perempuan dalam negara kolonial mencerminkan sebuah fenomena historis mengenai wacana kolonial (laki-laki) terhadap perempuan, baik di antara kelompok penjajah maupun yang dijajah pada kelompok-kelompok tersebut. Perempuan menjadi pihak marginal dan yang terlambat dilibatkan secara penuh dalam “proyek kolonial” pendidikan Barat, baik dalam arti pendidikan umum maupun pendidikan khusus (vokasional). Selain itu, juga terdapat faktor struktur hubungan hierarki dan kekuasaan dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki (Scholten, 2000). Oleh karena itu, dapat dipahami ketika isu ini mencuat pada awal abad ke-20 tidak langsung mendapatkan respons dari pemerintah kolonial Belanda.

Meskipun dalam beberapa karyanya, Hans Pols tidak secara khusus membahas mengenai pendidikan dokter untuk perempuan. Namun dia menganalisis bagaimana para lulusan sekolah kedokteran pribumi di Hindia Belanda, termasuk di dalamnya perempuan, yang menggunakan pengetahuan medisnya untuk mengkritik ketidakadilan di negara kolonial, seperti disparitas gaji dan status inferior dibanding dokter Eropa. Sementara pada sisi yang lain, kaum perempuan ini juga menghadapi hambatan seperti hierarki rasial dan gender yang membuat partisipasi mereka terbatas (Pols, 2018).

Sementara Liesbeth Hesselink memberikan analisis yang lebih mendalam dan kritis terhadap pendidikan dokter untuk perempuan pribumi. Hesselink melihatnya sebagai kemajuan yang terbatas dan diskriminatif dalam kerangka kebijakan negara kolonial. Hesselink mengkritik interseksi feminisme dengan administrasi kolonial sebagai “tindakan kecil yang menyedihkan”, di mana kesempatan bagi perempuan untuk mengakses pendidikan dokter masih terikat pada tujuan imperial. Akibatnya perempuan terisolasi dan dampaknya terbatas ketika akan melakukan layanan publik. Dalam konteks ini, menurut Hesselink gender menjadi aspek krusial yang selalu dianggap sebagai faktor kegagalan; perempuan dipandang kurang bergengsi, sering menghadapi pemindahan, dan berkompetisi dengan dukun (Hesselink, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini adalah proses kehadiran dokter perempuan pribumi dalam sistem kesehatan negara kolonial. Dengan permasalahan utama itu, maka dalam kajian ini ditetapkan dua tujuan penelitian yaitu 1) menjelaskan faktor sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi keterbatasan akses pendidikan dokter untuk perempuan pribumi dan 2) menganalisis kebijakan kolonial, sistem pendidikan, dan struktur kekuasaan yang menjadi hambatan sistemik bagi perempuan pribumi dalam mengakses pendidikan dokter di Indonesia pada masa kolonial.

## II. PEMBAHASAN

Pemerintah kolonial Belanda baru mengizinkan perempuan pribumi mengakses pendidikan kedokteran di Hindia Belanda pada 1912. Sebelumnya pada tahun 1909, anak perempuan seorang jaksa di Bogor meminta izin kepada Direktur Departement van Onderwijs, Erendients en Nijverheid, untuk dapat menjadi siswa di sekolah kedokteran STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen) di Batavia, namun permintaan itu ditolak (*De Locomotief*, 25 Maart 1909). Tiga tahun setelah penolakan tersebut, tepatnya pada September 1912, pemerintah kolonial memberi izin seorang perempuan asal Minahasa bernama Marie Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, untuk dapat mengakses studi bidang kedokteran di STOVIA (*De Telegraaf*, 21 April 1909). Dua tahun kemudian, November 1914, diterima siswa perempuan kedua di STOVIA bernama Anna Adeline Warouw, lahir 23 Februari 1898 di Amurang, Minahasa (De Waart, 1926).



**Gambar 1.** Marie Thomas  
*Sumber: javapost.nl.*

Kehadiran dua perempuan asal Manado yang menjadi siswa di STOVIA pada periode ini menjadi hal yang menarik, karena dapat dijadikan sebagai indikator beberapa faktor fenomena historis mengenai isu pendidikan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Pertama, Marie Thomas dan Anna Warouw merupakan produk pendidikan yang cukup progresif di wilayah Manado,

yang ditandai dengan sudah munculnya kesadaran dari perempuan pribumi untuk melanjutkan pendidikan bidang kedokteran. Kedua, kehadiran Sjarifah, Marie Thomas, dan Anna Warouw menunjukkan bahwa masyarakat Minang dan Minahasa lebih terbuka dan akomodatif terhadap adanya keinginan kemajuan perempuan terutama dalam pendidikan modern tingkat lanjut. Ketiga, ketiga perempuan itu bukanlah produk pendidikan yang ada di kota-kota besar di Jawa, seperti Batavia, Bandung, Semarang, Yogyakarta, atau Surabaya, tetapi berasal dari daerah yang oleh pemerintah kolonial Belanda disebut dengan istilah *buitenbezittingen* atau daerah jajahan luar Jawa dan Madura. Hal ini dapat dipahami karena ketika ketiga perempuan ini mulai menempuh pendidikan lanjut vokasional itu, Sekolah Kartini pertama yang diinisiasi oleh C. Th. van Deventer baru didirikan di Semarang pada 15 September 1913 (Marihandano, 2016) yang kemudian disusul pendiriannya di beberapa kota besar lainnya seperti Malang, Madiun, Bogor, dan Jakarta (Yuliati, 2017).



**Gambar 2.** Anna Warouw  
*Sumber: Dokumentasi keluarga Anna Warouw*

Ketika pada tahun 1914, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan laporan mengenai survei kesejahteraan penduduk di Jawa, hal ini mendorong perempuan pribumi yang berpendidikan untuk secara terbuka mengungkapkan pandangan mereka tentang apa yang mereka anggap perlu untuk emansipasi perempuan pribumi (Onderzoek, 1914). Jawaban umumnya adalah pendidikan dan lebih banyak pendidikan (*De Sumatra Post*, 22 January 1918).

Namun terobosan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda, ketika mengizinkan perempuan pribumi mendapatkan akses pendidikan kedokteran di Hindia Belanda ini masih tetap diskriminatif jika dibandingkan dengan kebijakan yang sama terhadap laki-laki pribumi (*De Expres*, 31 December 1912). Pemerintah kolonial Belanda hanya mengizinkan perempuan pribumi untuk bersekolah di STOVIA tetapi tidak memberikan biaya pendidikannya, sebagaimana diberikan

kepada siswa lak-laki di sekolah itu (*De Nieuwe Courant*, 20 February 1913). Alasan pemerintah kolonial Belanda karena dokter perempuan tidak dapat diangkat menjadi dokter pemerintah karena tidak dapat ditugasi untuk memeriksa para kuli (*De Preanger Bode*, 10 Maart 1913).

Beberapa kalangan, terutama dari para perempuan Belanda, mengapresiasi keberanian Marie Thomas untuk mendaftar ke STOVIA. Hal yang sama juga diberikan kepada Gubernur Jenderal karena telah memberi izin dan terakhir kepada STOVIA yang akhirnya menerima Marie Thomas sebagai siswa perempuan pertamanya, tentu setelah melalui seleksi. Dalam konteks pendidikan untuk kalangan perempuan pribumi di Hindia Belanda, diterimanya Marie Thomas sebagai siswa di STOVIA, sekolah lanjutan vokasional yang paling maju di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Marie Thomas telah membuka jalan kepada perempuan pribumi untuk mendapatkan akses pendidikan lanjut dalam bidang kedokteran, yang selama 60 tahun sejak pendiriannya, didominasi oleh siswa laki-laki.

Sebelum Marie Thomas dan kemudian disusul Anna Warouw diterima di STOVIA, terdapat perdebatan di media massa waktu itu mengenai perlu tidaknya dokter perempuan dari kalangan pribumi. Kalangan yang mendukung perlunya dokter perempuan pribumi menyatakan bahwa jika diberi pilihan pasien perempuan tentu lebih memilih untuk tidak dirawat oleh dokter laki-laki, kecuali kasus-kasus serius dan mendesak yang memang kehadiran dokter lak-laki sangat diperlukan.

Hal ini tidak berhubungan dengan ketidakpercayaan terhadap perilaku moral dokter laki-laki yang mencegah perempuan pribumi untuk menjalani pengobatan. Melainkan lebih karena rasa malu pasien perempuan itu sendiri, yang dihasilkan dari proses pendidikannya, yang membuatnya menghindari dokter laki-laki. Akibatnya, kasus-kasus serius, yang pada awalnya tidak terlihat terlalu buruk, tidak mendapatkan pertolongan medis karena keengganan pasien perempuan diperiksa oleh dokter laki-laki (*De Expres*, 31 December 1912).

Dari kondisi itu, menurut pendukung dokter perempuan pribumi, dengan jelas dapat dinyatakan bahwa masyarakat pribumi sangat membutuhkan dokter perempuan. Tidak hanya perempuan pribumi, perempuan Eropa pun akan lebih memilih dokter perempuan daripada dokter laki-laki jika dia memiliki keterampilan yang diperlukan. Sehingga memang terdapat kebutuhan yang besar akan dokter perempuan dalam konteks ini. Dari sisi medis, di klinik-klinik kebidanan maupun di rumah sakit-rumah sakit besar, dokter perempuan sangat dibutuhkan. Dalam hal persalinan yang masih dilakukan oleh dukun, maka keberadaan dokter perempuan sangat terbuka dalam masyarakat pribumi (*De Sumatra Post*, 4 September 1912). Artinya bahwa keberadaan dokter perempuan pribumi sudah dibutuhkan dan terdapat lapangan kerja yang luas yang dapat dimasuki oleh dokter perempuan pribumi (*De Preanger Bode*, 5 September 1912).

Setelah Marie Thomas resmi diterima sebagai siswa STOVIA, namun tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah kolonial, beberapa orang perempuan Belanda yang berprofesi sebagai bidan dan apoteker, merespons dengan membentuk sebuah perkumpulan/yayasan yang dinamakan Vereeniging Studiefonds voor Opleiding van Vrouwelijke Inlandsche Artsen (SOVIA) di Batavia

pada 19 Agustus 1912 (Onderzoek, 1914). Perkumpulan ini bertujuan untuk menghimpun dana untuk pendidikan kedokteran bagi perempuan pribumi di Hindia Belanda. Dalam berbagai kesempatan pengurus SOVIA menulis di beberapa koran yang menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pribumi dalam pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. Agaknya apa yang dilakukan oleh para perempuan Belanda ini mengadaptasi apa yang terjadi di India.

Dalam anggaran dasar organisasi, tujuan didirikannya SOVIA adalah: 1). memberikan dukungan finansial kepada gadis-gadis pribumi yang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi dokter, bidan, dan perawat; 2). membiayai tempat tinggal bagi anak-anak perempuan yang belajar di tempat lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian; 3). mendirikan atau mengelola sekolah asrama untuk anak perempuan pribumi. Jika keadaan keuangan memungkinkan, anak-anak perempuan pribumi yang ingin mengubah studi mereka juga dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan (*De Preanger Bode*, 19 Agustus 1914).



**Gambar 3.** Marie Thomas dan Anna Warouw di antara siswa-siswa STOVIA  
*Sumber: Dokumentasi keluarga Anna Warouw*

Perkumpulan SOVIA diinisiasi oleh beberapa tenaga kesehatan perempuan Belanda, pertama Charlotte Jacobs yang selama 30 tahun bekerja sebagai apoteker, dan kedua Hellemans yang telah berpraktik selama 7 tahun sebagai bidan di Hindia Belanda (Mededeelingen, 1938). Keduanya telah lama menyadari betapa besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh bidan yang tidak berpendidikan atau dukun di Hindia Belanda. Dari keyakinan ini, lahirlah pemikiran bahwa harus ada perempuan pribumi yang berpendidikan dalam bidang kesehatan dan kedokteran dan mendapatkan kepercayaan masyarakat (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 1 Maart 1913). Mereka bisa saja berprofesi sebagai dokter, bidan, atau perawat (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 19 February 1913). Faktor kepercayaan masyarakat pribumi ini sangat penting karena dibutuhkan

waktu yang lama bagi dokter dan dokter perempuan Eropa untuk memperoleh kepercayaan tersebut (*De Nieuwe Courant*, 20 February 1913). Belum lagi, semua dokter Eropa lebih suka menetap di pusat kota-kota besar terutama di Jawa (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 04 January 1913).



**Gambar 4.** dr. Marie Thomas sedang melakukan tindakan medis terhadap seorang pasien pada 1929.  
*Sumber: javapost.nl*

Semua pengurus perhimpunan SOVIA terdiri dari para perempuan Belanda. Mereka adalah Charlotte Jacobs (presiden), N. Hazeu Opwjrda (wakil presiden), M.C. Kooy-van Zeggelen (sekretaris), A. Hellemans-van Veithoven (Sekretaris II), dan J.C.D. Wefers Bettink-van den Bussche (bendahara) (*Maçonniek Weekblad*, 1913). SOVIA menggalang dana untuk beasiswa perempuan pribumi yang melanjutkan pendidikan dalam bidang kedokteran yang tidak dibiayai melalui beasiswa oleh pemerintah kolonial. Selain menyediakan beasiswa, SOVIA juga mendirikan asrama bagi siswa perempuan, karena asrama STOVIA tidak didesain untuk menampung siswa perempuan (*De Expres*, 30 Augustus 1912). Dalam hal pengadaan asrama untuk siswa perempuan di Batavia, SOVIA mendapatkan bantuan dari Perkumpulan Sedyo Mulyo (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 18 December 1915).

Penggalangan dana dilakukan oleh SOVIA dengan berbagai cara misalnya menerima sumbangan langsung dari lembaga atau perorangan (bersifat insidental maupun tahunan), menyelenggarakan pasar malam, membuat pertunjukan teater atau tonil, dan membuat undian lotere (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 10 October 1913). Penggalangan dana ini tidak terbatas hanya di wilayah Hindia Belanda, namun juga dilakukan di Belanda melalui jaringan organisasi perempuan, di mana Charlotte Jacobs menjadi bagian di dalamnya (*De Expres*, 23 April 1913).

Dengan bantuan dana beasiswa dari SOVIA ini dan juga bantuan dari Vereeniging tot

Bevordering van Inlandsche Ziekenzorg, setelah menempuh studi selama kurang lebih 10 tahun akhirnya Marie Thomas berhasil lulus dari STOVIA pada 1922 (*De Expres*, 02 Mei 1922), menyusul kemudian Anna Warouw pada 1924 (*De Indische Courant*, edisi 27 August 1924). Siswa yang berbarengan lulus dengan Marie Thomas antara lain J. Leimena, Goelam, dan J.Z. Karamoy. Kelulusan Marie Thomas mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, tidak terkecuali oleh Perhimpunan Dokter Pribumi, Vereeniging Indische Geneeskundigen (VIG), yang memberinya sebuah hadiah. Marie Thomas dianggap sebagai pelopor bagi perempuan pribumi untuk mendapatkan pendidikan kedokteran pada masa kolonial (*Algemeen Handelsblad*, 15 June 1922).

Keberhasilan Marie Thomas dan Anna Warouw menempuh pendidikan dokter di STOVIA kemudian mendorong perempuan-perempuan pribumi lainnya untuk mengakses pendidikan yang sama. Di NIAS (Nederlandsche Indie Artsen School) di Surabaya, kemudian muncul nama Soerti Tirtotenojo, putri seorang Patih dari Pekalongan yang masuk pada tahun 1922 dan berhasil lulus pada 1929 (*De Locomotief*, 24 Juli 1929). Sehingga dapat dikatakan bahwa Soerti Tirtotenojo merupakan dokter perempuan Jawa pertama yang lulus dari lembaga pendidikan kedokteran pada masa kolonial. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1931, Moerdjani juga berhasil lulus dari NIAS dan menjadi dokter perempuan dari Jawa (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 02 February 1931).

Perkembangan siswa perempuan yang menempuh pendidikan dokter terjadi pasca dibukanya GHS menggembirakan. Pada angkatan pertama mahasiswa di GHS tahun 1927, menerima 27 mahasiswa yang terdiri dari 9 orang Eropa, 10 orang Pribumi, 8 orang Tionghoa. Dari sisi jenis kelamin, 26 orang merupakan mahasiswa laki-laki dan 1 perempuan (*Algemeen Handelsblad*, 17 September 1928). Peningkatan jumlah siswa perempuan yang cukup signifikan terjadi di NIAS. Pada tahun 1938, jumlah total siswa NIAS adalah 361 orang, 26 di antaranya merupakan siswa perempuan (*Soerabaiasch Handelsblad*, 13 September 1938). Sementara di STOVIT (School tot Opleiding van Indische Tandartsen atau Sekolah Kedokteran Gigi untuk Pribumi) di Surabaya, yang didirikan pada tahun 1928, sampai tahun 1938 sudah meluluskan 60 dokter gigi dan 20 di antaranya merupakan perempuan (*Deli Courant*, edisi 17 September 1939).

Meskipun tidak diketahui secara pasti mengenai jumlah mahasiswa perempuan di GHS pada tahun 1930an, namun dapat dipastikan jumlahnya mengalami peningkatan. Hal itu dapat diketahui ketika pada tahun 1934 didirikan organisasi mahasiswa perempuan yang diberi nama Indonesische Vrouwelijke Studentenvereniging (Perhimpunan Mahasiswa Perempuan Indonesia) di GHS (Verslag, 1940).

Keberadaan dokter-dokter perempuan pribumi ini kemudian mampu mengubah peraturan pemerintah kolonial Belanda mengenai dokter pemerintah yang berasal dari perempuan. Jika awalnya pemerintah kolonial Belanda tidak mau mengangkat dokter perempuan menjadi dokter pemerintah, maka sejak tahun 1920-an pemerintah kolonial Belanda kemudian mau mengangkat dokter perempuan ini menjadi dokter pemerintah. Keempat dokter perempuan pionir, baik yang

lulus dari STOVIA maupun dari NIAS itu, kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda diangkat menjadi dokter pemerintah.

Marie Thomas misalnya, begitu lulus langsung diangkat menjadi dokter pemerintah yang ditugaskan di CBZ (Centrale Burgelijke Ziekenverpleging) Batavia. Kemudian Soeri Tirtotenojo bertugas di rumah sakit Kadipolo, Surakarta, selain itu dia juga menjadi dokter keluarga bangsawan di Kasunanan Surakarta. Perempuan pribumi yang mendapatkan pendidikan kedokteran makin banyak jumlahnya ketika STOVIA digantikan oleh GHS pada 1927. Salah satu di antara dokter perempuan lulusan GHS (Geneeskundige Hooze School) adalah Julie Sulianti Soelaiman.

Marie Thomas kemudian menjadi dokter spesialis bagian ginekologi dan kebidanan. Pada tahun 1932, ia aktif di organisasi Persatoean Minahasa, sebuah organisasi politik nasionalis moderat yang mendukung Indonesia federal dengan jaminan identitas dan otonomi Minahasa (javapost.nl). Ia lalu mendirikan sekolah kebidanan pertama di Bukittinggi pada tahun 1950 dan memperkenalkan metode kontrasepsi IUD di Indonesia. Sementara Anna Warouw berkontribusi di laboratorium rumah sakit di Manado dan Jakarta, memenuhi syarat pelayanan pemerintah sambil menikah dan kemudian melanjutkan studinya di Belanda. Anna Warouw mengambil spesialisasi otorinolaringologi (THT) di Universitas Leiden, Belanda, antara tahun 1933-1935 (Almanak, 1934).

Namun begitu, apa yang dilakukan oleh Charlotte Jacobs dan SOVIA, dalam konteks ini, juga perlu diberi catatan. Meskipun tujuan awal Charlotte Jacobs dan SOVIA ini adalah untuk mendobrak adanya diskriminasi pendidikan dokter di Hindia Belanda, sekaligus untuk memperjuangkan emansipasi kedudukan perempuan dalam mengakses pendidikan dokter. Namun, apa yang dilakukan oleh Charlotte Jacobs dan SOVIA justru menciptakan sebuah diskriminasi baru. Dua orang perempuan yang dibantu menempuh pendidikan di STOVIA dan diberi beasiswa oleh SOVIA itu, Marie Thomas dan Anna Warouw, berasal dari satu etnis dan agama yaitu Minahasa dan Kristen. Tidak ada siswa lain yang berasal dari etnis dan agama yang berbeda dengan Marie Thomas dan Anna Warouw, yang diperjuangkan oleh Charlotte Jacobs dan SOVIA untuk bisa mengakses pendidikan dokter pada waktu itu.

Selain itu juga tidak ada penjelasan yang memadai dari Charlotte Jacobs dan SOVIA, mengenai alasan dan latar belakang yang dijadikan dasar dalam memilih Marie Thomas dan Anna Warouw untuk diberi kesempatan mendapatkan akses pendidikan dokter di STOVIA. Atau sebaliknya, mengapa Charlotte Jacobs dan SOVIA tidak memberi kesempatan kepada perempuan dari etnis dan agama lain di Hindia Belanda untuk diberi kesempatan mendapatkan akses pendidikan dokter di STOVIA.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Keberadaan siswa perempuan pribumi pionir dalam pendidikan dokter pada masa kolonial bukanlah sesuatu yang mudah. STOVIA awalnya menolak siswi perempuan karena anggapan bahwa perempuan tidak mampu menangani diseksi mayat atau jam belajar panjang. Namun, dukungan dari gerakan feminis Belanda, seperti Charlotte Jacobs melalui pendirian SOVIA, telah mampu membuka jalan bagi perempuan pribumi untuk mengakses pendidikan dokter. Kehadiran Marie Thomas dan Anna Warrouw, merupakan simbol perlawanan terhadap patriarki kolonial yang meminggirkan kaum perempuan dalam bidang kedokteran Barat.

Keberadaan mereka menantang stereotip gender dan membuka pintu bagi perempuan lain untuk mengejar kariernya dalam bidang medis. Kelulusan mereka menjadi berita besar di media Hindia Belanda yang menandai terjadinya pergeseran paradigma sosial di mana perempuan pribumi mulai diakui sebagai agen perubahan dalam bidang kesehatan. Keberadaan mereka juga telah mampu menginspirasi berbagai organisasi gerakan kesetaraan gender awal, bahkan kisah Marie Thomas ini dibicarakan dalam Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1928.

#### B. Saran

Pada era kontemporer, kisah perjuangan Marie Thomas dan Anna Warouw tetap relevan sebagai pengingat perjuangan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan dan profesi, khususnya STEM (*Science, Technology, Engineering, Medicine*). Saat ini, perempuan mendominasi angkatan dokter di Indonesia (sekitar 60-70% mahasiswa kedokteran adalah perempuan), tetapi tantangan seperti kesenjangan gaji, beban ganda rumah tangga, dan *underrepresentation* pada posisi kepemimpinan masih ada—mirip dengan rintangan patriarkat yang mereka hadapi pada masa kolonial. Kisah mereka perlu dijadikan bagian *insight* dalam kurikulum pendidikan dokter di Indonesia agar menjadi inspirasi bagi generasi muda. Lebih luas lagi, kisah mereka juga relevan dengan isu global seperti *Sustainable Development Goal* (SDG) 5 tentang kesetaraan gender, di mana Indonesia masih berjuang meningkatkan partisipasi perempuan di sektor kesehatan pedesaan. Mereka juga menjadi simbol bagi perempuan di daerah terpencil, seperti Minahasa, untuk mengejar mimpi di tengah keterbatasan, mengingatkan bahwa perubahan dimulai dari satu individu yang berani menantang norma. Warisan mereka menjadi penting ketika sejarah kolonial bisa menjadi fondasi pemberdayaan perempuan hari ini.

## DAFTAR PUSTAKA

*Algemeen Handelsblad*, 15 June 1922.

*Algemeen Handelsblad*, 17 September 1928.

*Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden*, MCMXXXIV, Dertiende Jaargang 1934.

Balfour, and Young. (1929), *The Work of medical women in India*, Oxford University Press.

*Bataviaasch Nieuwsblad*, 04 January 1913.

*Bataviaasch Nieuwsblad*, 01 Maart 1913.

*Bataviaasch Nieuwsblad*, 18 December 1915.

*Bataviaasch nieuwsblad*, 10 October 1913.

*De Expres*, 23 April 1913.

*De Expres*, 30 August 1912.

*De Expres*, 31 December 1912.

*De Expres*, 02 Mei 1922.

*De Indische Courant*, 27 August 1924.

*De Locomotief*, 25 Maart 1909.

*De Locomotief*, 24 Juli 1929.

*De Nieuwe Courant*, 20 February 1913.

*De Preanger Bode*, 10 Maart 1913.

*De Preanger-Bode*, 05 September 1912.

*De Preanger-Bode*, 19 August 1914.

*De Sumatra Post*, 04 September 1912.

*De Sumatra Post*, 22 January 1918.

*De Telegraaf*, 21 April 1909.

De Waart, A. et al., (1926), *Ontwikkeling van het geneeskundig onderwijs te weltevreden, 1851-1926*, G. Kolff & Co.

*Deli Courant*, edisi 17 September 1939

Forbes, G. (2005), "Education to earn: Training women in the medical professions", dalam *Women in colonial India: Essays on politics, medicine, and historiography*, Chronicle Books.

- Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsche-Indie*, Deel 80, Afd. Afl. 34, 20 Augustus 1940.
- Guha, A. (2016), "The 'masculine' female: The rise of women doctors in colonial India, c. 1870–1940", *Social Scientist*, Vol. 44, No. 5/6.
- Hesselink, L. (2011), *Healers on the colonial market: Native doctors and midwives in the Dutch East Indies*. Leiden: KITLV Press.
- Hesselink, L. "Marie Thomas (1896-1966), de eerste vrouwelijke arts in Nederlands-Indië", diakses melalui <https://javapost.nl/2012/09/06/marie-thomas-1896-1966-de-eerste-vrouwelijke-arts-in-nederlands-indie/>
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 19 February 1913.
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 02 February 1931.
- Marihandano, D., dkk, (2016) *Sisi lain Kartini*, Museum Kebangkitan Nasional
- Maçonniek Weekblad; uitgaaf voor broeders*, jrg 62, 1913, No. 22.
- Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding*, Juli 1938. 9e Jaargang No. 2.
- Molyneux, M. (1985), "Mobilization without emancipation? women's interests, state and revolution in Nicaragua" *Female Studies*, 11(2).
- Nawawi St. dan Kramer, (1908), *Gedenkboek kweekschool fort de kock, 1873-1908*. G. J. Thieme.
- Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera*, (1914) Drukkerij G. Kolff & Co.
- Pols, H. (2018), *Nurturing Indonesia: Medicine and decolonisation in the Dutch East Indies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Scholten, E. L. (2000), "By way of a prologue and epilogue: Gender, modernity and the colonial state" dalam Elsbeth Locher-Scholten (ed.). *Women and the colonial State: Essays on gender and modernity in the Netherlands Indies 1900-1942*, Amsterdam University Press.
- Soerabaiasch Handelsblad*, 13 September 1938
- Stoler, A. L. (1989a), "Making empire respectable: The politics of race and sexual morality in 20th-century colonial cultures", *American Ethnologist*, Nov., 1989, Vol. 16, No. 4.
- Stoler, A. L. (1989b), "Rethinking colonial categories: European communities and the boundaries of rule." *Comp. Studies in Society and History* 13(1).
- Van der Wal, S.L. (1968) *Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië, 1900-1940*, J.B. Wolters.
- Verslag over den cursus 1939-1940, *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsche-Indie*, Deel 80, Afd. Afl. 34, 20 August 1940.
- Yuliati, D. (2017), "Kartini: Sang penyibak fajar nasionalisme Indonesia", *Sabda Volume 12, Nomor 1*.